

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Yogyakarta, sering disingkat DIY, terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan dikelilingi oleh Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat dan timur, serta Samudra Hindia di sebelah selatan. Daerah Istimewa Yogyakarta terkenal karena kekayaan budayanya, termasuk seni, tari, musik, dan kekayaan arsitektur tradisionalnya. Sejak masa kolonial Belanda, DIY telah dikenal karena peran pentingnya dalam perjuangan kemerdekaan dan sebagai pusat kebudayaan Jawa. Pada masa kini, DIY memiliki hubungan yang erat antara sejarah dan budaya dengan pendanaan di berbagai sektor.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima pendanaan istimewa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk mendukung kewenangan istimewa DIY di samping tanggung jawab yang dimiliki oleh provinsi lainnya. Dalam konteks anggaran untuk suatu negara atau provinsi, dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya' (21:73) dijelaskan bahwa:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ

Artinya:

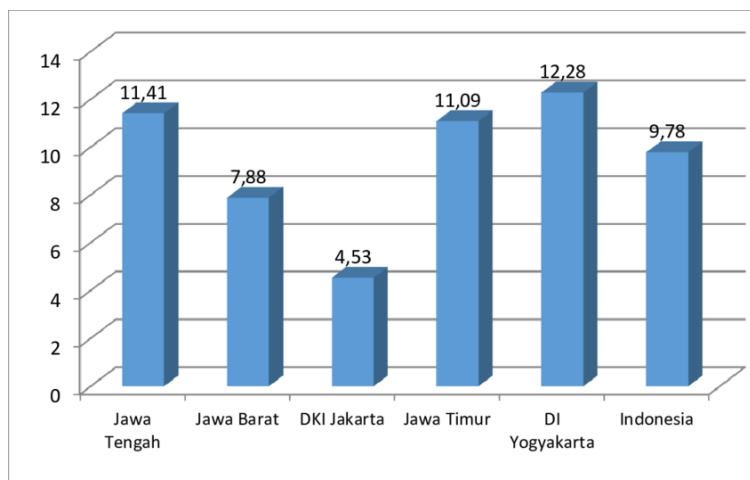
*“Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.”*

Atas dasar ayat tersebut yang merefleksikan hubungan antara pemimpin dan rakyat, maka pemimpin akan menentukan masa depan rakyatnya. Kebijakan yang bijaksana dibuat oleh pemimpin yang baik dari pihak pengelola dimana dalam penelitian ini adalah pihak provinsi. Kemudian, kerjasama yang solid antara pihak yang mengelola dengan publik. Serta, program kerja yang dinamis-kontekstual yaitu kemampuan suatu sistem atau entitas untuk beradaptasi, berubah, atau bereaksi terhadap berbagai kondisi atau konteks yang berubah seiring waktu. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa agar tercipta kebijakan yang baik maka baik pengelola keuangan publik dan masyarakat itu sendiri untuk selalu dalam kebenaran dan menghindari kemungkar.

Sebagai provinsi istimewa, DIY memiliki hak khusus dalam pengelolaan keuangan dan otonomi daerah. Dana Keistimewaan ini digunakan untuk menjaga dan memperluas keistimewaan DIY serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penyediaan Dana Keistimewaan untuk DIY didasarkan pada kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, DIY juga mendapatkan hak istimewa karena peran Sultan Hamengkubuwono dan

Kadipaten Pakualaman dalam perjuangan kemerdekaan. Penyaluran Dana Keistimewaan DIY dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Keistimewaan DIY adalah bentuk pengakuan dari pemerintah pusat terhadap kontribusi dan peran penting DIY dalam sejarah dan budaya Indonesia, serta sebagai upaya untuk mendukung DIY dalam mempertahankan identitas budayanya yang kaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DIY, dan dapat dialokasikan untuk berbagai program seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelestarian budaya dan tradisi, serta pengembangan ekonomi lokal. Dana Keistimewaan DIY mendukung kewenangan tambahan DIY yang tidak termasuk dalam wewenang yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penggunaannya diarahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat, dengan fokus pada mempertahankan dan mengembangkan keistimewaan DIY serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

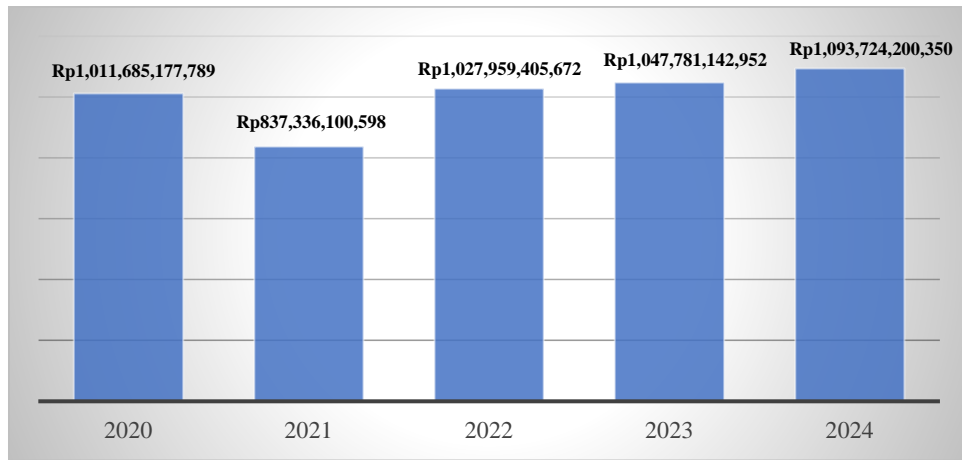


Sumber: Analisis Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah (Jurnal PIPSI)

**Gambar 1. 1**

**Diagram Tingkat Kemiskinan Jawa Tengah**

Gambar 1.1. menunjukkan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dimana Yogyakarta memiliki persentase paling tinggi se-Jawa Tengah. Peneliti tertarik membahas terkait pemafaatan dana keistimewaan sebab Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki pendanaan khusus namun mengapa tingkat kemiskinan masih menduduki posisi tertinggi menurut Sari (2023) pada penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah: Suatu Kajian Berdasarkan Faktor Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Lokasi Dan Indeks Pembangunan Manusia”. Penelitian ini ingin mengetahui dana keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta apakah sudah digunakan secara efektif walaupun tingkat kemiskinannya masih tertinggi se-Jawa Tengah menurut persepsi masyarakat itu sendiri dari segi pengelolaannya.



Sumber: BAPPEDA Provinsi Yogyakarta

### **Gambar 1. 2**

#### **Jumlah Alokasi Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta**

Grafik di atas merupakan jumlah alokasi dana keistimewaan DIY selama lima tahun terakhir. Secara umum, alokasi dana keistimewaan terus meningkat selama empat tahun terakhir. Dana keistimewaan ini biasanya dialokasikan untuk mendukung proyek-proyek atau program-program yang dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau memajukan tujuan-tujuan pembangunan tertentu. Alokasi dana keistimewaan juga bisa menjadi instrumen untuk mendukung pembangunan daerah tertentu yang mungkin membutuhkan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengelolaan dana keistimewaan ini diatur oleh Badan Keuangan Keistimewaan (BKK), yang bertanggung jawab atas investasi, pengelolaan keuangan, pemberian pinjaman, dan pengawasan terhadap dana tersebut. Dana keistimewaan DIY dapat digunakan untuk mendukung berbagai program

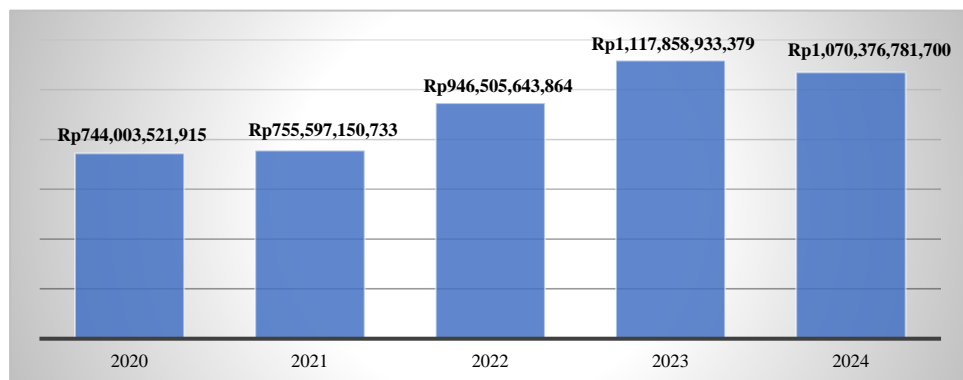
pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dana keistimewaan merupakan bentuk komitmen negara dalam mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Dana transfer ke daerah akan disalurkan sesuai dengan periode tahun anggaran dan jangka waktu penyaluran yang sudah ditetapkan sebelumnya serta didasarkan atas kondisi kas negara, kinerja pelaksanaan perpajakan daerah, dana transfer ke daerah, dan kebijakan pengendalian belanja daerah dalam kerangka sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Pemanfaatan dana keistimewaan Yogyakarta mencakup sejumlah program dan inisiatif penting yang bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan keistimewaan daerah tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dana keistimewaan ini digunakan secara hati-hati dan efisien untuk mendukung berbagai sektor penting. Pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY juga harus sesuai dengan aspirasi masyarakat di semua bidang dengan ciri fisik, budaya, dan karakter masyarakat Yogyakarta. Selain itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kalurahan harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Dana Keistimewaan DIY disalurkan ke Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten/Kota lainnya di DIY untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan. Dana Keistimewaan DIY juga diberikan

kepada wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.

Dana keistimewaan ini memiliki peran penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan sosial, dan memperkuat infrastruktur wilayah. Melalui pemanfaatan yang bijaksana dan strategis, dana keistimewaan Yogyakarta dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, memperkuat fondasi ekonomi, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat setempat.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan dana keistimewaan digunakan dalam salah satu program dari pendanaan elemen “Kebudayaan” Yogyakarta yang diambil dari Dana Keistimewaan DIY. Jumlah alokasi dana keistimewaan DIY selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 1. 3.



Sumber: BAPPEDA Provinsi Yogyakarta

**Gambar 1. 3**  
Alokasi Elemen Kebudayaan Dana Keistimewaan DIY

Pemanfaatan dana keistimewaan pada program desa preneur diambil dari elemen kebudayaan dimana menurut grafik elemen kebudayaan mendapat alokasi dana keistimewaan yang cukup besar daripada elemen lainnya. Informasi dari website resmi provinsi Yogyakarta selama 2 tahun terakhir, pemerintah DIY telah menggelontorkan dana rata-rata mencapai Rp. 250 juta untuk tiap kalurahan pada 2023. Sedangkan pada 2024 terjadi kenaikan anggaran dimana untuk desa preneur rata-rata dana yang diberikan mencapai Rp. 500 juta untuk tiap kalurahan. Kenaikan jumlah anggaran ini mengindikasikan bahwa program desa preneur ini memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pemanfaatan Dana Keistimewaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Yogyakarta” untuk mengetahui persepsi masyarakat apakah pemanfaatan dana keistimewaan ini dinilai sudah efektif atau belum melalui beberapa aspek.

Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan dana keistimewaan, penelitian ini akan menggunakan 4 aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan transparansi yang nantinya aspek tersebut memiliki indikator yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini.

## **B. Batasan Penelitian**

Penelitian ini terbatas pada analisis terkait pengaruh dana keistimewaan dalam meningkatkan kesejahteraan yang diukur dari aspek perencanaan,



pelaksanaan, evaluasi, dan transparansi. Dana Keistimewaan dalam penelitian ini merupakan pendanaan yang digunakan dalam program desa preneur. Program desa preneur Yogyakarta ini dilaksanakan pada 17 kalurahan yang ada di Yogyakarta. Desa Preneur merupakan model pengembangan yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi lokal dan kewirausahaan di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian di Desa Preneur dapat memberikan wawasan tentang bagaimana dana keistimewaan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi di tingkat desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakat

Untuk aspek perencanaan, indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perencanaan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah relevansi strateginya, alokasi sumber daya, partisipasi masyarakat dan ketepatan tujuannya. Untuk aspek pelaksanaan, indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif pelaksanaan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada kepatuhan rencana, pemanfaatan sumber daya, dan partisipasi pendamping. Untuk aspek evaluasi, indikator yang digunakan meliputi pencapaian tujuan, efisiensi pemanfaatan, dampak sosial dan ekonomi. Kemudian untuk aspek transparansi indikator yang digunakan adalah keterbukaan informasi, dan akuntabilitas. Sedangkan untuk aspek kesejahteraan, indikator yang digunakan meliputi pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari aspek perencanaan pemanfaatan dana keistimewaan bagi kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh dari aspek pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan bagi kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh dari aspek evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan bagi kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh dari aspek transparansi pemanfaatan dana keistimewaan bagi kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta?
5. Bagaimana pengaruh pemanfaatan dana keistimewaan dari aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan transparansi bagi kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta secara bersama-sama?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh dari aspek perencanaan pemanfaatan dana keistimewaan bagi kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.

2. Untuk menganalisis pengaruh dari aspek pelaksanaan pemanfaatan dana keistimewaan bagi kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh dari aspek evaluasi pemanfaatan dana keistimewaan bagi kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh dari aspek transparansi pemanfaatan dana keistimewaan bagi kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.
5. Untuk menganalisis pengaruh dari seluruh aspek secara bersama-sama yaitu, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan transparansi bagi kesejahteraan masyarakat di Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat bagi penulis

Penulisan skripsi ini memungkinkan penulis untuk mendalami pemahaman yang lebih terkait dengan konsep dan penerapan dana keistimewaan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat

b. Manfaat bagi akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi menjadi pengetahuan dan wawasan baru untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa atau lanjutan terkait dengan dana keistimewaan Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi pemerintah

Sebagai sumbangan gagasan dan rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat yang melibatkan pemanfaatan dana keistimewaan, terutama yang dilakukan oleh kalurahan yang ada di wilayah Yogyakarta khususnya penerima dana keistimewaan.

b. Manfaat bagi masyarakat

Harapannya, temuan dari penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk memperluas pemahaman tentang dana keistimewaan, terutama dalam hal efektivitas penggunaannya di wilayah Yogyakarta.